https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom E-ISSN: 3032-1190
Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM) Juli 2026, Vol.04, No. 02, Hal: 391 – 396

RESEPSI KHALAYAK TENTANG SIRINE KENDARAAN PATWAL DI KOTA SURABAYA (Analisis Resepsi Model Stuart Hall)

[1]Daniel Hamonangan Sitompul, [2]Moh. Dey Prayogo, [3]Jupriono
[1,2,3]Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
daniel.hamonanga@gmail.com

Abstrak
Penggunaan sirine pada kendaraan patroli dan pengawalan (patwal) di jalan raya kerap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena dianggap memiliki dua makna yang berbeda, yaitu sebagai simbol urgensi keselamatan lalu lintas dan sebagai simbol arogansi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi resepsi khalayak Kota Surabaya terhadap sirine kendaraan patwal berdasarkan teori resepsi Stuart Hall, yang membagi pemaknaan khalayak ke dalam tiga posisi, yaitu hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang berprofesi sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, sopir angkutan umum, kurir paket, dan pengemudi ojek online di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima informan berada pada posisi negosiasi, yaitu menerima fungsi sirine sebagai alat komunikasi nonverbal yang memberikan prioritas bagi kendaraan bertugas, namun tetap mengkritik penggunaannya yang dianggap tidak selalu sesuai tingkat urgensi. Satu informan berada pada posisi oposisi yang memaknai sirine sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ditemukan informan pada posisi hegemoni dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa resepsi khalayak terhadap sirine kendaraan patwal bersifat kritis dan dipengaruhi oleh pengalaman sosial masing-masing individu di jalan raya.
Kata kunci: Resepsi Khalayak, Sirine Kendaraan Patwal, Kota Surabaya

Abstract
The use of sirens on patrol and escort vehicles (patwal) on public roads frequently sparks mixed reactions among the public, as it is perceived to carry two contrasting meanings: a symbol of traffic safety urgency and a symbol of arrogance or abuse of authority. This study aims to identify the reception position of the Surabaya public toward patwal vehicle sirens based on Stuart Hall's reception theory, which divides audience interpretation into three positions: dominant hegemony, negotiation, and opposition. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving five informants consisting of a student, an office worker, a public transport driver, a parcel courier, and an online motorcycle taxi driver in Surabaya. The findings reveal that four out of five informants occupy a negotiated position, accepting the siren's function as a nonverbal communication tool that grants priority to vehicles on duty, while still criticizing its use when deemed inconsistent with the actual level of urgency. One informant occupies an oppositional position, interpreting the siren as a form of power abuse. No informant was found in the dominant hegemonic position. This study concludes that public reception of patwal vehicle sirens is critical in nature and is shaped by each individual's social experience on the road.
Keyword: *Public Reception, Police Vehicle Siren, Surabaya City*

Pendahuluan

Sirine merupakan perangkat yang dirancang untuk menghasilkan bunyi dengungan keras yang umumnya digunakan sebagai sinyal peringatan atau tanda bahaya, dan kerap dipasang pada kendaraan darurat seperti ambulans, kendaraan polisi, dan pemadam kebakaran (Permana et al., 2022). Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sirine didefinisikan sebagai perangkat lampu isyarat berwarna merah, biru, atau kuning yang menjadi penanda kendaraan berprioritas utama, termasuk kendaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Patroli dan pengawalan (patwal) merupakan unit Direktorat Lalu Lintas yang bertugas mendampingi perjalanan tokoh penting (Rukmanto, 2016).

Penggunaan sirine kendaraan patwal kerap mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, membuat pengendara terkejut, panik, dan kehilangan konsentrasi, sehingga muncul kesan bahwa kendaraan yang dikawal memiliki prioritas eksklusif yang bebas dari kewajiban mengantre (Sadana, 2024). Fenomena ini banyak ditemukan di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, di mana kesadaran masyarakat akan etika berkendara menjadi kunci keteraturan jalan raya (Azizah et al., 2025). Laporan Antara, (2025) turut mencatat keresahan warga akibat penggunaan sirine dan strobo secara ilegal, sementara Voi.id, (2025) melaporkan bahwa penyalahgunaan sirine kerap dipersepsikan sebagai simbol arogansi pejabat.

Penelitian terdahulu oleh Azizah et al., (2025) terhadap pengemudi ojek online menunjukkan bahwa penggunaan sirine di luar konteks darurat cenderung dipersepsikan menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi konflik, meskipun pengemudi sering memilih mengalah demi keselamatan. Penelitian lain oleh (Sapitri et al., (2025) mengkaji konstruksi arogansi patwal melalui analisis framing media daring, sedangkan Riyanto, (2016) mengkaji persepsi masyarakat terhadap konvoi klub motor bersirine dari segi hukum dan sosial. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan teori framing atau persepsi, sehingga belum mengkaji secara spesifik bagaimana posisi resepsi khalayak terhadap sirine kendaraan patwal menggunakan teori resepsi Stuart Hall, yang menjadi celah kebaruan dalam penelitian ini.

Teori resepsi Stuart Hall (1973) melalui model encoding-decoding menyatakan bahwa khalayak aktif memaknai pesan media berdasarkan konteks sosial dan pengalaman mereka, bukan sekadar menerima pesan secara pasif (Miftahulma'ayis, 2025). Khalayak dapat menempati tiga posisi pemaknaan, yaitu hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi. Dalam konteks lalu lintas, sirine kendaraan patwal dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi nonverbal berupa simbol indeks yang merepresentasikan urgensi, prioritas, dan keselamatan perjalanan (Doly, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi resepsi khalayak Kota Surabaya terhadap penggunaan sirine kendaraan patwal berdasarkan teori resepsi Stuart Hall, sekaligus mengungkap faktor pengalaman sosial yang membentuk pemaknaan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan resepsi khalayak terhadap sirine kendaraan patwal di Kota Surabaya tanpa bermaksud melakukan generalisasi (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian adalah

lima informan pengendara motor atau mobil di Kota Surabaya dengan latar belakang berbeda, yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, sopir angkutan umum, kurir paket, dan pengemudi ojek online, yang dipilih berdasarkan kriteria memiliki mobilitas tinggi dan pernah bertemu kendaraan patwal bersirine di jalan raya. Objek penelitian adalah sirine kendaraan patwal yang difokuskan pada proses decoding makna oleh khalayak.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) yang bersifat tidak terstruktur, observasi non-partisipan terhadap hasil wawancara, dan dokumentasi berupa foto serta data pendukung lain (Abrar, 2024). Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan kemudian dikategorikan ke dalam tiga posisi resepsi Stuart Hall, yaitu hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan menggabungkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara terhadap lima informan, ditemukan bahwa resepsi khalayak terhadap sirine kendaraan patwal di Kota Surabaya hanya menempati dua dari tiga posisi dalam teori resepsi Stuart Hall, yaitu posisi negosiasi dan posisi oposisi. Tidak ditemukan informan yang berada pada posisi hegemoni dominan, karena seluruh informan masih memiliki kritik terhadap penggunaan sirine kendaraan patwal.

Posisi Negosiasi

Empat dari lima informan, yaitu Deo (mahasiswa), Erick (pekerja kantoran), Bambang (sopir angkutan umum), dan Petrus (kurir paket), berada pada posisi negosiasi. Keempatnya menerima fungsi dasar sirine sebagai tanda bagi pengguna jalan untuk menepi dan memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal, sesuai dengan konsep indeks yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara bunyi sirine dengan kebutuhan keselamatan dan kelancaran perjalanan kendaraan prioritas. Namun, keempat informan tetap mengkritisi praktik penggunaannya. Deo menilai penggunaan sirine cukup mengganggu apabila digunakan oknum pejabat untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan urusan dinas. Erick menganggap penggunaan sirine untuk mengawal pejabat kurang penting karena semua pengendara memiliki kepentingan yang sama, dan menilai penggunaan yang ideal adalah untuk mengawal ambulans. Bambang yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum merasa terganggu terutama saat menaikkan atau menurunkan penumpang, sementara Petrus sebagai kurir paket merasa kesulitan bermanuver saat membawa muatan berat ketika harus segera memberi jalan.

Hasil ini sejalan dengan temuan Azizah et al., (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan sirine di luar konteks darurat cenderung dipersepsikan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakadilan simbolik di ruang publik, meskipun pengguna jalan tetap memilih mengalah demi keselamatan. Temuan ini juga relevan dengan penelitian Jannah et al., (2022) yang menegaskan bahwa sirine memiliki fungsi penting dalam pengawalan, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan kenyamanan khalayak.

Posisi Oposisi

Satu informan, yaitu Ridho yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, berada pada posisi oposisi. Tingginya intensitas mobilitas Ridho di jalan raya membuatnya hampir setiap hari

berhadapan langsung dengan kendaraan patwal bersirine, bahkan hingga tiga sampai empat kali dalam sehari. Pengalaman tersebut membentuk pandangan negatif, di mana Ridho menilai sirine kendaraan patwal menimbulkan kebisingan dan keresahan, terutama ketika digunakan untuk mengawal rombongan motor gede (moge) pada akhir pekan saat kondisi lalu lintas relatif lengang sehingga dinilai tidak memiliki urgensi. Ridho menolak makna dominan bahwa sirine semata-mata simbol keselamatan dan prioritas, dan memaknainya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan serta arogansi. Temuan ini sejalan dengan Riyanto, (2016) yang menemukan bahwa konvoi kendaraan bersirine dan berlampu strobo kerap dianggap mengganggu konsentrasi pengguna jalan lain, serta sejalan dengan Azizah et al., (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan sirine tanpa urgensi menciptakan ketimpangan sosial di ruang publik.

Posisi Hegemoni Dominan

Penelitian ini tidak menemukan satu pun informan yang berada pada posisi hegemoni dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada informan yang menerima penggunaan sirine kendaraan patwal secara penuh tanpa kritik atau reservasi apapun. Seluruh informan, tanpa terkecuali, masih memiliki pertimbangan dan kritik tertentu terhadap praktik penggunaan sirine di lapangan. Absennya posisi hegemoni dominan ini mencerminkan tingkat kesadaran kritis masyarakat Kota Surabaya yang cukup tinggi terhadap isu keadilan penggunaan ruang publik, termasuk jalan raya.

Analisis Encoding dan Decoding Sirine Kendaraan Patwal

Dalam kerangka encoding-decoding Stuart Hall, institusi kepolisian melalui kendaraan patwal melakukan encoding terhadap sirine sebagai simbol urgensi, keselamatan, dan prioritas perjalanan berdasarkan ketentuan hukum lalu lintas. Proses encoding ini relatif berhasil pada level pengenalan fungsi dasar, karena seluruh informan memahami bahwa bunyi sirine merupakan tanda untuk memberikan jalan. Namun, pada level pemaknaan yang lebih mendalam terjadi perbedaan proses decoding yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, latar belakang pekerjaan, dan intensitas interaksi masing-masing informan dengan kendaraan patwal di jalan raya.

Informan dengan mobilitas dan intensitas pertemuan yang lebih tinggi di jalan raya, seperti pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, dan kurir paket, cenderung memiliki resepsi yang lebih kritis dibandingkan informan dengan mobilitas lebih rendah seperti mahasiswa dan pekerja kantoran. Tekanan situasional seperti kemacetan, kewajiban menaikkan-menurunkan penumpang, serta membawa muatan berat turut memperkuat persepsi negatif terhadap penggunaan sirine yang dianggap berlebihan. Temuan ini menegaskan bahwa proses resepsi khalayak bersifat aktif dan tidak seragam, sebagaimana dijelaskan dalam teori resepsi Stuart Hall, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara makna yang dikonstruksikan oleh institusi patwal dengan makna yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna jalan di Kota Surabaya.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa resepsi khalayak Kota Surabaya terhadap sirine kendaraan patwal hanya menempati dua posisi dalam teori resepsi Stuart Hall, yaitu posisi negosiasi yang ditempati oleh empat dari lima informan dan posisi oposisi yang ditempati oleh satu informan, sementara posisi hegemoni dominan tidak ditemukan. Khalayak pada dasarnya memahami

fungsi sirine sebagai alat komunikasi nonverbal dan simbol prioritas kendaraan tertentu di jalan raya, namun tetap bersikap kritis terhadap praktik penggunaannya yang dianggap sering tidak sesuai dengan tingkat urgensi dan aturan lalu lintas yang berlaku. Pengalaman sosial, latar belakang pekerjaan, dan intensitas interaksi dengan kendaraan patwal terbukti menjadi faktor penting yang membentuk perbedaan resepsi tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih tegas dalam mengawasi dan menertibkan penggunaan sirine kendaraan patwal agar sesuai dengan tingkat urgensi yang sebenarnya. Pengguna kendaraan yang mendapatkan fasilitas pengawalan diharapkan memanfaatkannya secara bijak dan tidak untuk kepentingan pribadi yang tidak mendesak, sementara khalayak pengguna jalan diharapkan tetap mematuhi aturan lalu lintas dan memahami fungsi sirine sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian resepsi khalayak maupun komunikasi nonverbal di jalan raya dengan pendekatan atau metode yang berbeda agar diperoleh pembahasan yang lebih luas dan mendalam.

.

Daftar Pustaka

Abrar, M. (2024). Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar (Team Unja Publisher (ed.)). UNJA PUBLISHER.

Antara. (2025). Warga ungkap keresahan akibat penggunaan strobo dan sirine. https://www.antaranews.com/berita/5127788/warga-ungkap-keresahan-akibat-penggunaan-strobo-dan-sirine

Azizah, N., Ningsih, R., Chamidah, N., Wulandari, S. D., & Maizul, S. (2025). Respon Pengemudi Ojek Online terhadap Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk sebagai Wujud Kesadaran Toleransi di Jalan Raya (aStudi Kasus di Kota Surabaya). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1840–1851. https://doi.org/https://doi.org/10.63822/t7seaa63

Doly, D. (2020). Law Enforcement Of The Use Of Terms And Lights Sirene On Motor Vehicles. Jurnal.Dpr.Go.Id, 25, 323–340. https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3905

Jannah, M., Deni, I. F., & Rozi, F. (2022). Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Balai Dalam Meningkatkan Tertib Lalu Lintas. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(12), 2691–2698.

Miftahulma'ayis, Edy Sudaryanto, H. (2025). Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Pada Konten Edukasi Finansial Timothy Ronald. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (Semakom), 03(02), 440–445. https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom/article/view/6108

Permana, M. F., Alif, F., & Arie, D. (2022). Klasifikasi Suara Sirene Menggunakan Stft (Short-Term Fourier Transform). Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, 1(3), 44–58. https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JUISI/article/view/414

Riyanto, F. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Convoi Club Motor Unlimited Riders Community Jogja Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Strobo yang Melanggar UU

No 22 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman. Jurnal Hukum Dan Sosial Politeknik, 8, 33–47. https://repository.upy.ac.id/1758/1/ARTIKEL FAJAR RIYANTO.pdf

Rukmanto, M. E. (2016). Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawalan (Patwal) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Seminar Nasional Hukum, 2(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64206

Sadana. (2024). Penggunaan Strobo/Sirine, Simbol Kekuasaan dan Privillege di Jalan. MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/penggunaan-strobosirine-simbol-kekuasaan-dan-privillege-01X

Sapitri, Diana Sapitri, D., Florina, I. D., & P. (2025). Konstruksi Realitas Arogansi Patwal di Platform Digital: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Patwal RI 36 di Media Online. Reslaj Religion Education Social LaaRoiba Journal, 7, 885–898. https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i1.6961

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo (ed.)). Penerbit Alfabeta.

Voi.id. (2025). Kompak Tolak Strobo Ilegal dan Sensitivitas Publik terhadap Arogansi Pejabat. https://voi.id/bernas/517497/kompak-tolak-strobo-ilegal-dan-sensitivitas-publik-terhadap-arogansi-pejabat